

RPJMD 2011 - 2015

PERDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 2 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2011 - 2015

- ABSTRAK** :
- Bahwa rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Aru memerlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah untuk menentukan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2005 – 2025. Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang berbunyi Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011 – 2015.
 - Dasar hukum : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2008; PP Nomor 5 Tahun 2010; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Perda Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 01 Tahun 2006; Perda Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011 – 2015.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 7 April 2012.

APBD 2012 – PERUBAHAN

PERDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 5 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan tersebut, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Proiritas dan Palfon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012.
 - Dasar hukum : UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 21 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 27 Tahun 2009; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 110 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 85 Tahun 2006; PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 21 Tahun 2007; Permendagri Nomor 22 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 14 November 2011.

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 3 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
 - Dasar hukum : UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 28 Tahun 2000; PP Nomor 30 Tahun 2000; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PermenPU Nomor 14/PRT/M/2010; PermenPU Nomor 04/PRT/M/2011.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Maksud, dan Tujuan;
 3. Usaha Jasa Konstruksi;
 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 5. Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK;
 6. Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Yang Memberikan IUJK;
 7. Pemberdayaan dan Pengawasan;
 8. Sistem Informasi;
 9. Ketentuan Lain-Lain;
 10. Ketentuan Peralihan;
 11. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Ditetapkan pada tanggal 08 Mei 2012.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA – PENGESAHAN
PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 4 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012**

- ABSTRAK** : - Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Evaluasi Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2012.
- Dasar hukum : UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 20 Tahun 2001; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 72 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Nomor 2 Tahun 2009.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2012, dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
 2. APBD Desa;
 3. Maksud dan Tujuan;
 4. Penyusunan APBD;
 5. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2012.

**PENJABARAN APBD 2012 – PERUBAHAN PERTAMA
PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 9 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PENJABARAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 9 Maret 2012 Nomor 34/PMK.07/2011 Perihal Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012 Perihal Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Dasar hukum : UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 1994; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 21 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 22 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 110 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 37 Tahun 2005; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 85 Tahun 2006; PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; Kepres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 21 Tahun 2007; Permendagri Nomor 37 Tahun 2010; Perda Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2011.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 08 September 2012.

**SPP-SPPN – PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 11 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PETUNJUK TEKNIS
OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INTEGRASI SISTEM
PEMBANGUNAN PARTISIPASIF – SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPP –
SPPN) KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP – SPPN).
- Dasar hukum : Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Surat Mendagri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 5 5 Nopember 2008; Perda Nomor 23 Tahun 2008; Perda Nomor 28 Tahun 2008.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP – SPPN), dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Sistematika;
 4. Pengendalian dan Evaluasi;
 5. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2012.